

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Gubernur Heru Serahkan ke DPRD DKI

JAKARTA (Poskota) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara terkait penolakan besar-besaran oleh para pengemudi ojek online (ojol) soal rencana kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau tarif jalan berbayar.

Heru Budi mengatakan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait ERP masih dalam proses pembahasan oleh DPRD DKI. Bahkan Ia menyebut semua aspirasi dari masyarakat akan selalu diperhatikan.

"Ya kan sedang proses di dprd, itu tergantung arahan dari teman-teman dprd apa ya kita ikut. Yang penting adalah semua aspirasi kita perhatikan," ucap Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/2).

Heru Budi mengatakan, bahwa pihaknya menyerahkan

sepenuhnya kepada DPRD DKI Jakarta terkait pencabutan Raperda ERP. "Hmm ya terserah, kalau dprd mau mengembalikan (Raperda ERP) ya silakan saja," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah masa aksi gabungan dari Pengemudi ojek online (ojol) Se-Jabodetabek mengadakan aksi demonstrasi besar-besaran didepan Balai Kota DKI Jakarta menuntut menolak kebijakan penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).

Dalam aksinya, sang orator diatas mobil komando (mokom) meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk dibatalkannya kebijakan ERP itu, karena hal tersebut dapat merugikan masyarakat kota Ibu Kota.

"Tolak ERP di jalan-jalan Jakarta. Karena itu merugikan masyarakat, pemerintah tahu betul bahwasanya ERP diterapkan di jalan provinsi. Tolong dikaji ulang untuk dibatalkan," Ucap salah satu orator.

Sebelumnya, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pj Gubernur DKI, Heru Budi Hartono, Bali Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Februari 2023.

Dalam aksinya, sang orator menegaskan, bahwa unjuk rasa kali ini untuk menolak secara tegas rencana kebijakan electronic road pricing (ERP) atau tarif jalan berbayar di Ibu Kota.

"Tolak ERP di jalan-jalan Jakarta. Karena itu merugikan masyarakat," teriak salah satu orator diatas mobil komando, Rabu (8/2). **(Aldi/yh)**